

# LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER



TAHUN  
**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Jember Tahun 2024.

31 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Jember



**ARIEN YAHYONO, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	11
E. SARANA PRASARANA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	12
F. ANGGARAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	13
G. ISU STRATEGIS.....	18
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>20</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	20
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	24
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	27
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024 .....	29
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.</b> .....	<b>30</b>
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 .....	30
B. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	31
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN .....	37
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	70
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	71
F. REALISASI ANGGARAN.....	74
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	<b>82</b>

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Lampiran SK IKU

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 3. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026

Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Lampiran 5. Cascading Kinerja 2024

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan target 80% dan terealisasi 100%, dengan demikian maka capaian kinerja pada sasaran 1 adalah 125% atau **Sangat Memuaskan**.

*Sasaran 2* : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran yaitu (1) Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD dengan target

capaian 91% dan terealisasi 91%, (2) Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD dengan target capaian 91% dan terealisasi 91%. dengan demikian maka capaian kinerja pada sasaran 2 adalah 91% atau **Sangat Memuaskan**.

*Sasaran 3* : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran yaitu (1) Indeks Inovasi Daerah dengan target capaian 59,62 dan terealisasi dengan capaian 71,09 atau sebesar 119,24%. (2) Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah dengan target capaian 100% dan terealisasi dengan capaian 100% atau sebesar 100%.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 5 (lima) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Namun demikian pada tahun mendatang Bappeda akan merumuskan peningkatan target capaian kinerja untuk pembangunan Kabupaten Jember yang lebih baik.

Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,28% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 17.758.641.434 dan Belanja Modal sebesar 0,72% atau sebesar Rp. 128.088.900.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.673.256.250 atau 70,85% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penyesuaian

dengan peraturan yang berlaku serta karena terdapat kekurangan data dukung atas beberapa kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang di Bappeda.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian dan pengembangan untuk dijadikan bahan masukan bagi pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan mendatang.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Dilakukan evaluasi terhadap SOTK serta melakukan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang perencanaan.
2. Hasil kajian/penelitian dan pengembangan menjadi bahan masukan bagi pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
3. Perlu dilakukan sinergi serta kolaborasi agar hasil pengukuran maupun evaluasi kinerja Perangkat Daerah dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan mendatang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan;
  - c. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah Badan;
  - b) Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang jasa milik negara;

- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- e) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - e) Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - f) Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - g) Pengkoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - h) Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - i) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
  - j) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - l) Pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
  - m) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - n) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan

pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e) Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f) Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g) Pengkoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h) Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - l) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - m) Mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
  - n) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e) Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f) Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- g) Pengkoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h) Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - l) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - m) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- g. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
- a) Merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b) Melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data, dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah.
  - c) Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b) Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c) Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d) Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e) Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h) Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k) Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n) Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- o) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- q) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- r) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- s) Penyusunan perencanaan program anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- t) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- u) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- v) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- w) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- x) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan

y) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

h. UPTD, dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 53 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 85 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 32 orang atau 37,65%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	5	-	-	5	-	5	-	-	-	3	2	5	-
2. Pengawas	2	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1
3. Pelaksana	45	21	9	15	-	13	1	5	-	5	2	8	5
Jabatan Fungsional	32	-	1	31	-	11	-	-	1	7	3	6	5
Non ASN						21	-	6	2	11	2	15	6
Jumlah	85	21	12	52	-	53	1	11	4	28	9	36	17

**Sumber** : Data Kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

#### **E. SARANA PRASARANA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Sudarman No. 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung yang digunakan sebagai kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember kurang memadai, karena dari sisi luas gedung dibanding jumlah pegawai atau jumlah bidang yang ada serta kebutuhan ruang (ruang rapat, gudang arsip, ruang tunggu) belum terpenuhi secara baik. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	1 Baik, 1 Kurang Baik	0

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	2 Baik, 1 Rusak	7
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32	28 Baik, 4 Rusak	32
4	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1 Rusak	0
5	Alat Ukur Universal	4	1 Baik, 3 Rusak	4
6	Mesin Ketik	1	1 Rusak	0
7	Alat Reproduksi (Penggandaan)	4	1 Baik, 3 Rusak	1
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	69	-	60
9	Alat Kantor Lainnya	9	-	-
10	Meubelair	63	-	-
11	Alat Pembersih	1	1 Baik	1
12	Alat Pendingin	43	20 Baik, 23 Rusak	-
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53	-	-
14	Alat Pemadam Kebakaran	1	1 Baik	1
15	Meja Kerja Pejabat	20	-	1
16	Meja Rapat Pejabat	1	1 Baik	1
17	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	1	1 Baik	1
18	Peralatan Studio Audio	1	1 Baik	2
19	Peralatan Studio Video Dan Film	24	-	-
20	Komputer Jaringan	1		
21	Personal Komputer	106	55 Baik	60
22	Peralatan Mainframe	1	Rusak	1
23	Peralatan Personal Komputer	98	-	60
24	Peralatan Jaringan	1		1
25	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	5		-
26	Software	6		-
27	Gedung	0	-	1
	<b>Jumlah</b>			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024

## F. ANGGARAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember memiliki 4 Program, 16 Kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp17.886.730.334,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten**  
**Jember**  
**Tahun 2024**

No.	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 8.841.949.954</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 92.480.900</b>
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 34.212.600
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 29.448.900
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 19.268.700
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 9.550.700
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 5.647.730.333</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.400.170.333
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 247.560.000
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 878.400.000</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 120.000.000
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 758.400.000
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 438.979.200</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.313.200

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 99.361.800
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 59.363.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 9.000.000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 260.941.200
	Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp -
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 141.626.900</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Rp 17.753.400
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 123.873.500
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.182.772.621</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 67.215.621
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 56.399.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.059.158.000
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 459.960.000</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 92.500.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 292.600.000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 55.000.000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 9.860.000
<b>2</b>	<b>Program: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp 3.464.209.200</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Rp 2.653.002.800</b>

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 107.071.200
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 165.031.700
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 579.258.600
	Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 362.587.600
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.439.053.700
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp 160.556.100</b>
	Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 160.556.100
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp 650.650.300</b>
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 650.650.300
<b>3</b>	<b>Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp 3.438.390.180</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rp 1.004.402.800</b>
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 60.086.200
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 95.987.800
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 293.328.600
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 44.389.600
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 93.917.600

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 416.693.000
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Rp 1.520.252.400</b>
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 43.381.000
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 46.600.000
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 69.832.100
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 949.949.900
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 57.549.900
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 352.939.500
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Rp 913.734.980</b>
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 157.891.400
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 74.795.800
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 352.349.200
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 63.246.800
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 265.451.780

No.	Uraian	Jumlah
4	<b>Program: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Rp 2.142.181.000
4.1	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Rp 442.181.000
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp 442.181.000
4.2	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Rp 600.000.000
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp 600.000.000
4.3	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Rp 1.100.000.000
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp 500.000.000
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp 300.000.000
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Rp 300.000.000

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. SDM Bappeda memiliki kemampuan Pengendalian dan Evaluasi (pengambilan data, standarisasi, akurasi, updating dan lengkap) dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan (bottom up dan top down) serta (menilai hasil) realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif

2. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan analisis dan teknis perencanaan yang baik serta kemampuan koordinasi, komunikasi dan asistensi kepada stakeholder perencanaan dengan baik
3. Bappeda mampu mengalokasikan anggarannya berbasis kinerja (dalam rangka mencapai target-target tercapainya tujuan perencanaan) dan membuat kebijakan alokasi anggaran untuk proses-proses perencanaan di Perangkat daerah
4. Bappeda mampu membuat kebijakan tentang pengelolaan data pembangunan daerah (pengambilan, standarisasi dan updating) dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan mulai level Perangkat Daerah
5. Bappeda mampu memberikan porsi yang adil pada bottom up planning dan top down planning untuk dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat
6. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan dan memberikan asistensi Sistem Informasi Perencanaan kepada stakeholder perencanaan dengan baik

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yaitu

1) Misi ke-2 (dua):

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya

2) Tujuan ke-1 (satu):

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan tepat waktu.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan**  
**Pembangunan Daerah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2021-2026**  
**(SEBELUM PERUBAHAN)**

Tujuan 1	: Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
Indikator Tujuan	: • Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD

- Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik	90%	91%	92%	93%	94%	95%
Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	80%	80%	81%	82%	83%	84%

Sumber : Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2021-2026**  
**(SETELAH PERUBAHAN)**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

- Indikator Tujuan :
- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan
  - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	75%	75%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	88%	89%	90%	91%	92%	93%
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPDP	88%	89%	90%	91%	92%	93%
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,32	58,72	59,12	59,62	60,02	60,42

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Indikator Tujuan : • Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Target Pembangunan Daerah Tahun berkenaan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Target Pembangunan Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>- Skor Total Maksimum adalah 250. Skala IID adalah 0 s.d. 100.</li> </ul>	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>

Sumber : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember No 065/257.1/411/2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Jember**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	23
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	18
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	91%
		Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 3 besar
		Indeks Pembangunan Statististik (IPS) dari BPS	2,6
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%
		Indeks Inovasi Daerah	59,62

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024

1.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Rp. 8.841.949.954	Sumber Dana: APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp. 3.464.209.200	Sumber Dana: APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp. 3.438.390.180	Sumber Dana: APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Rp. 2.142.181.000	Sumber Dana: APBD
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 17.886.730.334</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah

Didukung oleh :

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 3.464.209.200

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.464.209.200 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 19,37% dari keseluruhan belanja langsung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 3.438.390.180

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.438.390.180 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 19,22% dari keseluruhan belanja langsung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Didukung oleh :

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Anggaran Rp 2.142.181.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 2.142.181.000 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 11,98% dari keseluruhan belanja langsung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**


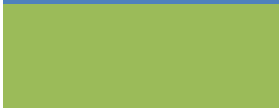



**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

## Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100 %)	7	8 (5/7*100 %)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	23	21,94	95,39%	25,00	87,76%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	18	17,36	96,44%	20,00	86,80%
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80 %	100% %	125,00%	100%	100%
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91 %	91 %	100,00%	100%	91%
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	91 %	91 %	100,00%	100%	91%
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100% %	100%	100%	100%
		Indeks Inovasi Daerah	59,62	71,09	119,24%	60,42	117,65%

Sumber Data Realisasi : SIPPD Badan Perencanaan Kabupaten Jember Triwulan III Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember rata rata mencapai 98,86% dan masuk dalam kategori **SANGAT MEMUASKAN**. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 98,86%. Dengan demikian maka secara umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan secara memuaskan dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	21,93	22,20	21,87	21,94
	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	14,92	17,44	17,25	17,36
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	-	75%	75%	100%
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	-	90%	90%	91%
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPd	-	90%	90%	91%
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	5,56	58,72	57,97	71,09

*Sumber Data Realisasi: LHE AKIP Kab. Jember ; data evaluasi program bidang rendalev; Indeks Inovasi daerah dari Kemendagri th 2024*

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu penilaian/evaluasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Capaian penilaian perencanaan kinerja menunjukkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 22,20 dan sedikit menurun pada tahun 2023 sebelum meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 21,94. Sementara itu, penilaian pada komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan signifikan dari 14,92 di tahun 2021 menjadi 17,44 di tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2023, nilai ini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 17,36. Tren ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang lebih optimal di masa mendatang.

**Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah**

Sasaran ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024. Persentase sasaran pembangunan daerah yang tercapai mulai terukur pada tahun 2022 sebesar 75% dan mempertahankan capaian yang sama pada tahun 2023. Nilai ini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 100%.

**Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah**

Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD berada di angka 90%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 91%. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan kualitas perencanaan yang selaras dengan dokumen strategis RPJMD.

Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD menunjukkan pola yang sama dengan keselarasan RKPD dengan RPJMD. Persentase keselarasan Renja

Perangkat Daerah (PD) dengan RKPD juga tercatat sebesar 90% pada tahun 2022 dan 2023, kemudian mencapai 91% pada tahun 2024.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Capaian pada indikator ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah tercatat sebesar 5,56, kemudian mengalami peningkatan pesat pada tahun 2022 menjadi 58,72. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan angka 57,97, upaya pengembangan terus dilakukan sehingga pada tahun 2024 mencapai 71,09. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan inovasi yang mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten	Ket. (+/-)
	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	21,94	-	
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	17,36	-	
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%		
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	-	
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	91%	-	
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	71,09	-	

*Sumber Data:*

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur karena tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah

Realisasi kinerja atas indikator Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur karena tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

a. Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD

Realisasi indikator ini menunjukkan capaian 91% pada tahun 2024. Namun, realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur karena tidak tersedianya data realisasi untuk indikator yang serupa.

b. Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD

Indikator ini juga menunjukkan capaian 91% pada tahun 2024. Sama seperti indikator sebelumnya, realisasi ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau regional Jawa Timur karena ketiadaan data pembandingan.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Indeks Inovasi Daerah

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Inovasi Daerah mencapai 71,09. Namun, realisasi ini tidak dapat diperbandingkan dengan data nasional maupun kabupaten/kota di Jawa Timur, karena tidak adanya data realisasi yang setara untuk indikator ini.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	3.464.209.200	2.127.896.063	61,43%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.653.002.800	1.607.014.018	60,57%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	107.071.200	-	0,00%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	165.031.700	-	0,00%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	579.258.600	444.623.861	76,76%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	362.587.600	43.449.000	11,98%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.439.053.700	1.118.941.157	77,76%
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>160.556.100</b>	<b>158.274.950</b>	<b>98,58%</b>
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	160.556.100	158.274.950	98,58%
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>650.650.300</b>	<b>362.607.095</b>	<b>55,73%</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	650.650.300	362.607.095	55,73%
<b>TOTAL</b>		<b>3.464.209.200</b>	<b>2.127.896.063</b>	<b>61,43%</b>
Sasaran 2.2: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.438.390.180</b>	<b>2.527.591.823</b>	<b>73,51%</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.004.402.800</b>	<b>784.365.994</b>	<b>78,09%</b>
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.086.200	29.120.100	48,46%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	95.987.800	18.683.000	19,46%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	293.328.600	259.394.049	88,43%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	44.389.600	11.525.000	25,96%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	93.917.600	75.048.000	79,91%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	416.693.000	390.595.845	93,74%
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.520.252.400</b>	<b>945.806.285</b>	<b>62,21%</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.381.000	30.634.230	70,62%
	Asistensi Penyusunan Dokumen	46.600.000	25.694.000	55,14%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.832.100	49.304.879	70,60%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	949.949.900	542.776.975	57,14%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57.549.900	34.742.785	60,37%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	352.939.500	262.653.416	74,42%
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>913.734.980</b>	<b>797.419.544</b>	<b>87,27%</b>
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	157.891.400	123.986.464	78,53%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	74.795.800	43.773.800	58,52%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	352.349.200	331.500.510	94,08%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63.246.800	52.899.500	83,64%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	265.451.780	245.259.270	92,39%
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>2.142.181.000</b>	<b>895.376.684</b>	<b>41,80%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.438.390.180</b>	<b>2.527.591.823</b>	<b>73,51%</b>
Sasaran 2.3: Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.142.181.000</b>	<b>895.376.684</b>	<b>41,80%</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>442.181.000</b>	<b>298.555.184</b>	<b>67,52%</b>
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	442.181.000	298.555.184	67,52%
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>596.821.500</b>	<b>99,47%</b>
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	600.000.000	596.821.500	99,47%
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1.100.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000	-	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	300.000.000	-	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	300.000.000	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2.142.181.000</b>	<b>895.376.684</b>	<b>41,80%</b>

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
GRAND TOTAL		17.886.730.334	12.673.256.250	70,85%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

#### Sasaran 1.1

Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah

Sub  
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 34.212.600	Rp 24.069.100
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1

Sub  
Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 29.448.900	Rp 22.018.000
Output	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	2

Sub  
Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 19.268.700	Rp -

Output	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
--------	--	---------	---	---

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 9.550.700	Rp 7.164.800
Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp5.400.170.333	Rp4.910.475.523
Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	462	291

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 247.560.000	Rp 247.276.000

Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	240	55
--------	---	---------	-----	----

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 120.000.000	Rp 105.867.500
Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3



Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 758.400.000	Rp 220.500.000
Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	185



Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 10.313.200	Rp 5.916.000
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 99.361.800	Rp 55.884.570
Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 59.363.000	Rp 43.610.300
Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 9.000.000	Rp 3.720.000
Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 260.941.200	Rp 199.590.889
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 17.753.400	Rp -

Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0
--------	------------------------------------	------	---	---

Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 123.873.500	Rp 67.265.300
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15



Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 67.215.621	Rp 25.651.893
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 56.399.000	Rp 12.700.000

Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
--------	--	---------	---	---

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp1.059.158.000	Rp 771.455.645
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 92.500.000	Rp 74.918.100
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1



Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 292.600.000	Rp 251.868.350
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27



Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
--	-------------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp	Rp	10.000.000	Rp	9.492.000
Output	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		20		20



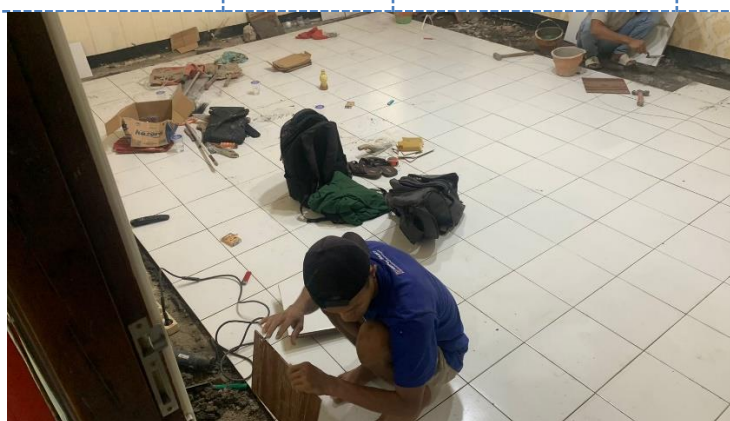
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 55.000.000	Rp 53.697.710
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50



Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 9.860.000	Rp 9.250.000
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1



#### Sasaran 2.1

Program: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kegiatan:

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 107.071.200	Rp -
Output	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1



Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025. Acara ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Kab. Jember, Kepala Bakorwil V Jember, Kepala Bappeda Kab. Jember serta para pemangku kepentingan. Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh saran masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kab. Jember Tahun 2025.

Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 165.031.700	Rp -
Output	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1



Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025. Berdasarkan amanat Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017, bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah untuk mempersiapkan saran dan pertimbangan, selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Hasil Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 126 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017, pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka peninjauan target, strategi, sasaran, program, dan kegiatan lokal dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 579.258.600	Rp 444.623.861

Output	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1
--------	---	--------------	---	---

Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 362.587.600	Rp 43.449.000
Output	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	31	31



Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp1.439.053.700	Rp1.118.941.157
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Dokumen	100	100



Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 160.556.100	Rp 158.274.950
Output	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	200	80



Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 650.650.300	Rp 362.607.095
Output	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4



### Sasaran 2.2

Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Kegiatan: Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 60.086.200	Rp 29.120.100
Output	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4



Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 95.987.800	Rp 18.683.000
Output	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	14	14



Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 293.328.600	Rp 259.394.049
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4



Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 44.389.600	Rp 11.525.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4



Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 93.917.600	Rp 75.048.000

Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	4
--------	---	---------	---	---



Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 416.693.000	Rp 390.595.845
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4



Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 43.381.000	Rp 30.634.230
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3



Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 46.600.000	Rp 25.694.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	7	7



Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 69.832.100	Rp 49.304.879
Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	7	7



Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 949.949.900	Rp 542.776.975
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	7	7



Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 57.549.900	Rp 34.742.785

Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5
--------	---	---------	---	---



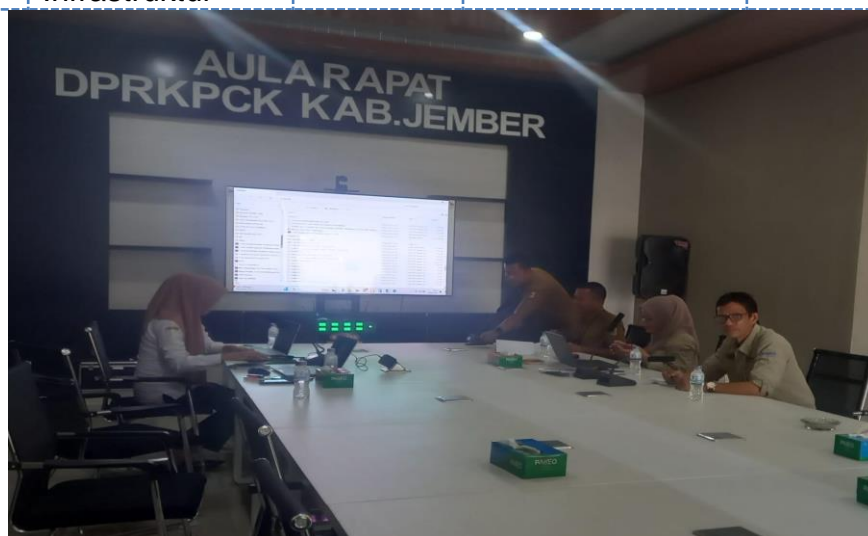
Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 352.939.500	Rp 262.653.416
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	5



Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
 Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  
 Kegiatan: Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 157.891.400	Rp 123.986.464
Output	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4



Sub Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen  
 Kegiatan: Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
--	-------------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 74.795.800	Rp 43.773.800
Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3



Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 352.349.200	Rp 331.500.510
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4



Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 63.246.800	Rp 52.899.500
Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1



Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 265.451.780	Rp 245.259.270
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4



### Sasaran 2.3

Program: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  
 Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
--	----------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 442.181.000	Rp 298.555.184
Output	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2



Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  
 Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 600.000.000	Rp 596.821.500
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	5	5



Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
 Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 500.000.000	Rp -
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	0



Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 300.000.000	Rp -
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	0



Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 300.000.000	Rp -
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	0



#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember berjumlah 51 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17.886.730.334 , melaksanakan 4 program 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Kategori Efisiensi</b>
<b>Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>95,39%</b>	<b>70,85%</b>	<b>Efisien</b>
	<b>96,44%</b>		
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	61,43%	Efisien
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	91,00%	73,51%	Efisien
	91,00%		
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	100,00%	41,80%	Efisien
	119,24%		

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian kinerja sebesar 95,39% dan 96,44% dengan serapan anggaran mencapai 70,85% dapat dikategorikan efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase serapan anggaran.

Sasaran 2.1 : Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja sebesar 57,56% dengan serapan anggaran mencapai 80,55% dapat dikategorikan tidak efisien karena persentase capaian kinerja lebih kecil dibandingkan dengan persentase serapan anggaran.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah

Capaian kinerja sebesar 100,00% dengan serapan anggaran sebesar 61,43% dapat dikategorikan efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase serapan anggaran.

Sasaran 2.3 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

Pada indikator pertama, capaian kinerja sebesar 91,00% dan pada indikator kedua, capaian kinerja sebesar 91,00% dengan serapan anggaran sebesar 41,80% dapat dikategorikan efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase serapan anggaran.

Sasaran 2.4: Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Pada indikator pertama, capaian kinerja sebesar 100,00% dan pada indikator kedua, capaian kinerja sebesar 119,24% dengan serapan anggaran sebesar 41,80% dapat dikategorikan efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase serapan anggaran.

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7

### Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah</b>						
Indikator 2.1.1 Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	100,00%					✓
Rata rata capaian	100,00%					✓
<b>Sasaran 2.2 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah</b>						
Indikator 2.2.1 Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91,00%	✓				
Indikator 2.2.2 Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	91,00%	✓				
Rata rata capaian	91,00%	✓				
<b>Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah</b>						
Indikator 2.3.1 Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100,00%					✓
Indikator 2.3.2 Indeks Inovasi Daerah	119,24%	✓				
Rata rata capaian	109,62%				✓	

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah Hasil evaluasi kinerja menunjukkan sasaran strategis ini mencapai predikat sangat tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 100,00%.

- Penyebab keberhasilan: implementasi yang efektif pada sasaran pembangunan daerah, tingginya pengawasan, dan tingginya pelibatan stakeholder dalam evaluasi pembangunan.

- Solusi terhadap kendala ke depan: Memperbaiki sistem evaluasi dengan menggunakan data yang valid dan real-time, serta meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan.
- Rencana perbaikan ke depan: Melakukan pelatihan khusus bagi tim evaluasi, memperbaiki mekanisme pelaporan capaian pembangunan, dan menerapkan reward/punishment untuk mendorong kinerja perangkat daerah.
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder: Membangun sistem evaluasi berbasis digital dan melibatkan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap capaian pembangunan daerah.

#### Sasaran Strategis 2.2: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan sasaran strategis ini mencapai predikat sangat tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 91,00%.

- Penyebab keberhasilan: Penyusunan RKPD dan Renja PD yang selaras dengan RPJMD didukung oleh perencanaan yang terstruktur, regulasi yang jelas, serta sinergi antar perangkat daerah.
- Solusi terhadap kendala ke depan: Memastikan seluruh perangkat daerah tetap konsisten dengan dokumen perencanaan induk, serta memperkuat pengawasan atas penyusunan dokumen perencanaan.
- Rencana perbaikan ke depan: Meningkatkan sosialisasi RPJMD kepada perangkat daerah dan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memperbaharui dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder: Pengembangan dashboard integrasi perencanaan daerah berbasis teknologi untuk memonitor keselarasan dokumen perencanaan secara berkala.

#### Sasaran Strategis 2.3: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan sasaran strategis ini mencapai predikat sedang dengan nilai capaian rata-rata sebesar 109,62%.

- Penyebab keberhasilan/kegagalan: Keberhasilan pada beberapa indikator seperti Indeks Inovasi Daerah (119,24%) menunjukkan tingginya inovasi dalam mendukung kebijakan daerah dan Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah (100,00%).
- Solusi terhadap kendala ke depan: Meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan, memperkuat kerja sama dengan universitas dan lembaga riset, serta memastikan hasil penelitian diaplikasikan dalam kebijakan.
- Rencana perbaikan ke depan: Menyusun roadmap penelitian yang relevan dengan isu pembangunan daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memberikan insentif bagi penelitian yang berdampak pada pembangunan daerah.
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder: Membangun forum penelitian daerah yang melibatkan akademisi, lembaga swasta, dan masyarakat untuk mendukung kebijakan berbasis data.

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.886.730.334 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 17.758.641.434 terealisasi sebesar Rp. 12.605.990.950,- (70,99%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 128.088.900 terealisasi sebesar Rp. 67.265.300,- (52,51%)

**Tabel 3.9**

**Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Jember Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	<b>Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.841.949.954</b>	<b>7.122.391.680</b>	<b>80,55%</b>
1.1	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.480.900</b>	<b>53.251.900</b>	<b>57,58%</b>
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.212.600	24.069.100	70,35%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.448.900	22.018.000	74,77%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.268.700	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.550.700	7.164.800	75,02%
1.2	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.647.730.333</b>	<b>5.157.751.523</b>	<b>91,32%</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.400.170.333	4.910.475.523	90,93%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	247.560.000	247.276.000	99,89%
1.3	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>878.400.000</b>	<b>326.367.500</b>	<b>37,15%</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000	105.867.500	88,22%
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	758.400.000	220.500.000	29,07%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>438.979.200</b>	<b>308.721.759</b>	<b>70,33%</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.313.200	5.916.000	57,36%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.361.800	55.884.570	56,24%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.363.000	43.610.300	73,46%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	3.720.000	41,33%
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.941.200	199.590.889	76,49%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>141.626.900</b>	<b>67.265.300</b>	<b>47,49%</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	17.753.400	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.873.500	67.265.300	54,30%
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.182.772.621</b>	<b>809.807.538</b>	<b>68,47%</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.215.621	25.651.893	38,16%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.399.000	12.700.000	22,52%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.059.158.000	771.455.645	72,84%
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>459.960.000</b>	<b>399.226.160</b>	<b>86,80%</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.500.000	74.918.100	80,99%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.600.000	251.868.350	86,08%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.492.000	94,92%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	53.697.710	97,63%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000	9.250.000	93,81%
<b>2</b>	<b>Program: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.464.209.200</b>	<b>2.127.896.063</b>	<b>61,43%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>2.653.002.800</b>	<b>1.607.014.018</b>	<b>60,57%</b>
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik	107.071.200	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	165.031.700	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	579.258.600	444.623.861	76,76%
	Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	362.587.600	43.449.000	11,98%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	1.439.053.700	1.118.941.157	77,76%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>160.556.100</b>	<b>158.274.950</b>	<b>98,58%</b>
	Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	160.556.100	158.274.950	98,58%
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>650.650.300</b>	<b>362.607.095</b>	<b>55,73%</b>
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	650.650.300	362.607.095	55,73%
<b>3</b>	<b>Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.438.390.180</b>	<b>2.527.591.823</b>	<b>73,51%</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.004.402.800</b>	<b>784.365.994</b>	<b>78,09%</b>
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.086.200	29.120.100	48,46%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	95.987.800	18.683.000	19,46%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	293.328.600	259.394.049	88,43%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	44.389.600	11.525.000	25,96%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	93.917.600	75.048.000	79,91%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	416.693.000	390.595.845	93,74%
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.520.252.400</b>	<b>945.806.285</b>	<b>62,21%</b>
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.381.000	30.634.230	70,62%
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.600.000	25.694.000	55,14%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	69.832.100	49.304.879	70,60%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Daerah Bidang Perekonomian			
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	949.949.900	542.776.975	57,14%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57.549.900	34.742.785	60,37%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	352.939.500	262.653.416	74,42%
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang dan Infrastruktur Kewilayahan</b>	<b>913.734.980</b>	<b>797.419.544</b>	<b>87,27%</b>
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	157.891.400	123.986.464	78,53%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	74.795.800	43.773.800	58,52%
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	352.349.200	331.500.510	94,08%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	63.246.800	52.899.500	83,64%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	265.451.780	245.259.270	92,39%
<b>4</b>	<b>Program: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.142.181.000</b>	<b>895.376.684</b>	<b>41,80%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>442.181.000</b>	<b>298.555.184</b>	<b>67,52%</b>
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	442.181.000	298.555.184	67,52%
<b>4.2</b>	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>596.821.500</b>	<b>99,47%</b>
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	600.000.000	596.821.500	99,47%
<b>4.3</b>	<b>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	300.000.000	-	0,00%
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	300.000.000	-	0,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.886.730.334</b>	<b>12.673.256.250</b>	<b>70,85%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, disimpulkan bahwa secara umum telah terdapat pencapaian kinerja yang beragam atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 3 indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat Rendah.

Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

- Hasil Capaian: **Capaian indikator program sebesar 57,56%, yang berada pada kategori Sangat Rendah.**
- Kendala atau hambatan:
  1. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah dalam pencapaian target program.
  2. Tidak optimalnya pengelolaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program.
  3. Minimnya pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap program yang berjalan.
- Rekomendasi rencana aksi ke depan:
  1. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program.
  2. Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memantau capaian program secara real-time.
  3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada tim pelaksana program.

### Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah

- Hasil Capaian: **Capaian rata-rata 100,00%, yang berada pada kategori Sangat Tinggi.**
- Kendala atau hambatan:
  1. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang efektif dan terintegrasi.
  2. Keterbatasan data yang valid untuk digunakan dalam proses evaluasi.
  3. Rendahnya keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah.
- Rekomendasi rencana aksi ke depan:
  1. Mengembangkan sistem evaluasi berbasis data dengan indikator yang jelas dan terukur.
  2. Memperkuat pelibatan stakeholder, termasuk akademisi dan lembaga masyarakat.
  3. Meningkatkan pelatihan evaluasi bagi tim yang terlibat.

### Sasaran Strategis 2.2: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

- Hasil Capaian: Indikator keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja PD dengan RKPD mencapai 91,00%, yang berada pada kategori Sangat Tinggi.
- Faktor kunci keberhasilan:
  1. Perencanaan yang terstruktur dengan dokumen acuan yang jelas.
  2. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam menyelaraskan dokumen perencanaan.
  3. Adanya pengawasan dan bimbingan teknis yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- Rekomendasi rencana aksi ke depan:
  1. Mempertahankan kualitas dokumen perencanaan melalui pembaruan secara berkala.
  2. Mengembangkan sistem integrasi digital untuk memantau keselarasan dokumen secara otomatis.
  3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam proses perencanaan.

### Sasaran Strategis 2.3: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

- Hasil Capaian: Rata-rata capaian 109,62%, dengan indikator Indeks Inovasi Daerah mencapai 119,24% (Sangat Tinggi) dan Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah sebesar 100,00% (Sangat Tinggi).
- Faktor kunci keberhasilan:
  1. Adanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
  2. Kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung peningkatan inovasi.
  3. Pengelolaan program inovasi yang efektif oleh perangkat daerah.
- Kendala atau hambatan:
  1. Tidak adanya fokus terhadap penelitian yang langsung mendukung kebijakan.
  2. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk penelitian dan pengembangan.
  3. Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan strategis.
- Rekomendasi rencana aksi ke depan:
  1. Menyusun roadmap penelitian yang selaras dengan isu strategis pembangunan daerah.
  2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian strategis.
  3. Mendorong kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Sudarman No. 1 ☎ (0331) 421200 Jember

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/257.1/411/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 29 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF YAHYONO, SE**

Penyelia Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 d. Pelaksanaan Administrasi Badan Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Target Pembangunan Daerah Tahun berkenaan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Target Pembangunan Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Wilayah</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Wilayah</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>- Skor Total Maksimum adalah 250.</li> </ul> <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p>	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. Sudarman No. 1 Telp. (0331) 421200 Jember

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIEF TYAHYONO, SE

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

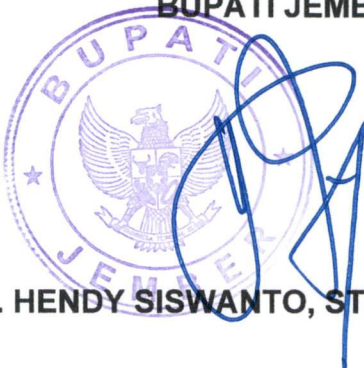

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng**

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF TYAHYONO, SE**  
NIP. 19750812 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	23
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	18
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	91%
		Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 3 besar
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari BPS	2,6
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%
		Indeks Inovasi Daerah	59,62

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.841.949.954	APBD
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.464.209.200	APBD
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.438.390.180	APBD
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	2.142.181.000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.886.730.334</b>	

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng**

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF TYAHYONO, SE**  
**NIP. 19750812 199602 1 001**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan			21.41	21.93	22.45	23	24	25			
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran			14.87	14.92	14.97	18	19	20			
			Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	75%	75%	75%	80%	85%	90%			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	88%	89%	90%	91%	92%	93%			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	88%	89%	90%	91%	92%	93%			
			Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,32	58,72	59,12	59,62	60,02	60,42			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 ☎ (0331) 421200 Jember

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

#### RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Misi 2: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Dan/Atau Tahunan Yang Akurat Dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

#### RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	100%				
	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundangan	100%	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Rp 107.071.200

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran	
						Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	100%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp 165.031.700	
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	Rp 579.258.600	
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	31 Usulan	Rp 362.587.600	
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	100 Dokumen	Rp1.439.053.700	
						<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk Perencanaan Daerah	100%	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	200 Buku	Rp 160.556.100
						<b>Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Rp 650.650.300

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	91%	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPd	100%				
			Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPd	91%	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap dokumen RPJMD	100%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Rp 60.086.200
			Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 3 besar		Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap dokumen Renstra	100%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	Rp 95.987.800
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari BPS	2,6				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Rp 44.389.600
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	Rp 93.917.600
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Rp 416.693.000
					<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terhadap dokumen RPJMD	100%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 43.381.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
						Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terhadap dokumen Renstra	100%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	Rp 46.600.000
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	Rp 69.832.100
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	Rp 949.949.900

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	Rp 57.549.900
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	Rp 352.939.500
					<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap dokumen RPJMD	100%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Rp 157.891.400

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
						Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap dokumen Renstra	100%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 74.795.800
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Rp 352.349.200
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Rp 63.246.800
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Rp 265.451.780

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Rencana penelitian yang terealisasikan	100%				
			Indeks Inovasi Daerah	59,62	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap dipublikasikan	100%	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2 Laporan	Rp 442.181.000
					<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang siap dipublikasikan	100%	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Dokumen	Rp 600.000.000
					<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang siap dipublikasikan	100%	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Rp 500.000.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Rp 300.000.000
								Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Rp 300.000.000



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 ☎ (0331) 421200 Jember

### RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	TW 1: 20% TW 2: 20% TW 3: 20% TW 4: 20%	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
			<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	TW 1: 1 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 0
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	TW 1: 1 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 0
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	Berita Acara	TW 1: 1 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 0
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	TW 1: 31 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 0
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 5 TW 3: 80 TW 4: 15

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	
			<b><i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 200
			<b><i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	TW 1: 20% TW 2: 20% TW 3: 20% TW 4: 31%	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	TW 1: 20% TW 2: 20% TW 3: 20% TW 4: 31%	<b><i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i></b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 4 TW 4: 0
	Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	TW 1: Nominasi 3 Besar TW 2: TW 3: TW 4:		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 14
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari BPS	TW 1: 2,6 TW 2: TW 3: TW 4:		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 2 TW 3: 1 TW 4: 1
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 4 TW 4: 0

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 8
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 2 TW 3: 1 TW 4: 1
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 3
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 7 TW 4: 0
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	TW 1: 2 TW 2: 2 TW 3: 2 TW 4: 1
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	TW 1: 2 TW 2: 2 TW 3: 2 TW 4: 1
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 5

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 3 TW 3: 1 TW 4: 1
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 2 TW 4: 2
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 3
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 1
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	TW 1: 25% TW 2: 25% TW 3: 25% TW 4: 25%		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	
	Indeks Inovasi Daerah	TW 1: TW 2: TW 3:59,62 TW 4:	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 1 TW 4: 1
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 3
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 1
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 1
				Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	TW 1: 0 TW 2: 0 TW 3: 0 TW 4: 1

Jember, 29 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Jember



**ARIEF YAHYONO, SE**

Pemimpin Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

# CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**  
**IK. Tujuan :**  
1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan  
2. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah**  
**IK : % Evaluasi Target Pembangunan Daerah**

**Sasaran 2 : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah**  
**IK :**  
1. % Keselarasan RKPd dengan RPJMD  
2. % Keselarasan Renja PD dengan RKPd

**Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah**  
**IK :**  
Indeks Inovasi Daerah

**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Indikator :**  
Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Indikator**  
Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPd

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**Indikator :**  
Rencana penelitian yang terealisasikan

**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**Indikator :**

Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

**1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

**Indikator :**

1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundangan
2. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam DPA Perangkat Daerah

**2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Indikator :**

1. Persentase Pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk Perencanaan

**3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Indikator :**

1. Persentase hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti

**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

**Indikator :**

- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator :**

1. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
2. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
3. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
4. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota
5. Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
6. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator :**

1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
2. Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan

**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**  
Indikator  
Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

**1. Koordinasi Perencanaan Bidang  
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**  
Indikator

1. Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap dokumen RPJMD
2. Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap dokumen Renstra

**2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan  
SDA (Sumber Daya Alam)**  
Indikator :

1. Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terhadap dokumen RPJMD
2. Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terhadap dokumen Renstra

**3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan  
Kewilayahan**  
Indikator :

1. Persentase keselarasan dokumen Renstra Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap dokumen RPJMD
2. Persentase keselarasan dokumen Renja Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap dokumen Renstra

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**Indikator :**

Rencana penelitian yang terealisasi

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

**Indikator :**

1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap dipublikasikan

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

**Indikator :**

1. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang siap dipublikasikan

1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

2. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

**Indikator :**

1. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang siap dipublikasikan

1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

5. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

6. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

7. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

8. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

**Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien**  
**IK. Tujuan : Nilai SAKIP OPD**

**Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah**  
**IK : % Indikator Program yang tercapai**

**Sasaran :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Indikator :**

1. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
4. Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah